

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tidak mungkin dapat dihindari. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis bahwa negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Karena itu negara harus berperan aktif dan terlibat langsung dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, bahkan jika perlu negara yang memutuskan apa yang terbaik untuk rakyatnya. Untuk itu negara harus membangun sistem administrasi dengan tujuan melayani kepentingan rakyatnya dan lebih akrab kita dengar dengan istilah birokrasi.¹ Berkenaan dengan upaya pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, birokrasi memiliki peranan yang lebih besar untuk mencapai tujuan ini. Semua yang terkait dalam penyelenggaraan negara tidak terlepas dari konteks *public service* dan *public affairs*, kebutuhan yang semakin kompleks mengharuskan birokrasi dikelola secara efisien dan efektif.²

Peran pemerintah yang strategis, akan banyak dibantu oleh birokrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.³ Tantangan terbesar yang dihadapi birokrasi adalah bagaimana melaksanakan secara efektif dan efisien, karena selama ini birokrasi diidentikkan dengan kinerja yang berbelit-belit, struktur yang gendut, penuh dengan korupsi dan nepotisme, serta tidak ada standar yang pasti.⁴ Seharunya birokrasi dan demokrasi dapat berjalan berdampingan yang akan

¹Ambar Teguh Susilawati, Memahami Good Governace Dalam Presfektif Sumber Daya Manusia, Gava Media, Yokyakarta, 2004, hlm 1.

²Ibid.

³Ibid., hlm. 2.

⁴Ibid.

melahirkan *democratic governance* yang dapat diartikan sebagai akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan mampu mengutamakan kepentingan publik.⁵

Reformasi birokrasi merupakan upaya penataan mendasar yang diharapkan dapat berdampak pada perubahan sistem dan struktur. Sistem yang berkaitan dengan unsur dan elemen saling mempengaruhi dan berkaitan membentuk suatu totalitas. Perubahan pada satu elemen dapat mempengaruhi elemen lain dan sistem itu sendiri. Struktur berhubungan dengan tatanan yang tersusun secara teratur dan sistematis. Sedangkan perubahan sarana dan prasarana, organisasi dan lingkungan dalam kerangka pencapaian tujuan efisiensi penyelenggaraan organisasi pemerintah. Mustafa juga menjelaskan bahwa kegagalan birokrasi terjadi karena belum tercapainya tujuan reformasi birokrasi salah satu tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan yang muncul di sektor publik.⁶

Keterpilihan pejabat politik yang dihasilkan dari pesta demokrasi tingkat lokal, pemilihan pemimpin secara langsung oleh masyarakat yang menempatkan posisi rakyat sebagai kontrol.⁷ Pada akhirnya birokrasi hidup untuk menjamin kepentingan relasi politik dan kepentingan kelompok, yang mengakibatkan meningkatnya tingkat korupsi, masyarakat tidak *care* terhadap birokrasi. *Mal-*kepemimpinan kepala daerah sering terjadi diberbagai daerah, yang seringkali terjadi setelah kepala daerah terpilih dan dilantik. Agenda kerja yang utama adalah bagaimana memilih pembantunya sesuai dengan keinginan dari pemimpin tersebut. Fenomena mutasi dan promosi jabatan yang menjadi tren yang tidak dapat dihindari diberbagai daerah. Sejalan dengan kemenangan pemimpin lokal

⁵ Samodra Wibawa, *Administrasi Negara Isu-isu Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm 226.

⁶ Delly Mustafa, *Birokrasi Pemerintah*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 150.

⁷ Ibid.

dalam Pilkada adalah bagaimana membagi kekuasaan sesuai dengan perjanjian politik yang disepakati dalam proses pencalonan pemimpin lokal dengan kata lain relasi politik dalam Pilkada.⁸

Menjadi hal yang wajar apabila seorang pemimpin baru melakukan reformasi dalam tubuh birokrasi melalui mutasi dan promosi jabatan secara besar-besaran. Namun, realitas yang terjadi mutasi dan promosi jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota merupakan hasil kontrak politik atau politik balas jasa sebagai konsekuensi logis karena telah mendukung calon kepala daerah. Implikasinya adalah penempatan pegawai yang tidak kompeten sesuai dengan jabatannya. Proses mutasi dan promosi jabatan tidak lagi mengedepankan profesionalisme, jenjang karir, melainkan sebagai pembagian kekuasaan atas kemenangan kepala daerah.⁹

Berbagai kritikan muncul tentang kepemimpinan kepala daerah, dapat dilihat dari aspek wewenang, hal yang dimaksudkan adalah hak prerogatif dari kepala daerah. Wewenang merupakan alat atau dasar hukum untuk bertindak. Wewenang adalah kekuasaan resmi yang dimiliki seseorang untuk bertindak dan memberi perintah kepada orang lain, dan wewenang yang didelegasikan dapat menariknya kembali. Balas jasa politik seringkali mewarnai dalam proses penempatan pegawai yang kurang memperhatikan syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat atau eselon tertentu.¹⁰

Berkaitan dengan kondisi di atas, birokrasi sering dimanfaatkan oleh kepentingan politik, tawar menawar politik antara birokrasi dan calon Bupati atau Walikota terhadap jenjang karir dan jabatan seorang birokrat dalam suatu

⁸ Ibid hlm 227.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid hlm 229.

pemerintahan. Sejatinya mutasi dan promosi jabatan merupakan tanggung jawab kepala daerah, dapat memilih seorang birokrat sesuai dengan persyaratan. Namun, terkadang persyaratan terabaikan karena adanya faktor pendukung seperti kedekatan dengan kepala daerah.¹¹

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mencapai *good governance* dan melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan terkait aspek kelembagaan, dan manajemen sumber daya manusia.¹² Dalam pelaksanaannya terjadi perdebatan antara hubungan politik serta birokrasi. Perdebatan tentang hubungan antara politik dan birokrasi. Perdebatan tersebut meliputi antara lain apakah politik lebih superior atau setara dengan birokrasi, apakah politik dan birokrasi merupakan satu kesatuan atau harus terpisah, serta bagaimana politik dan birokrasi seharusnya berhubungan.¹³

Pembahasan mengenai hubungan politik dan birokrasi kembali menghangat, khususnya di Indonesia, bahkan jauh sebelum reformasi terjadi pada penghujung tahun 1990-an. Netralitas birokrasi waktu itu menjadi suatu pembahasan yang hangat terutama di kalangan akademisi di tengah nuansa kooptasi birokrasi yang sangat kuat dari rezim Orde Baru Presiden Suharto.¹⁴ Dari pandangan peneliti sendiri terhadap kendala birokrasi di Indonesia hal yang paling krusial adalah masalah rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menempati jabatan tertentu, karena seringkali jabatan yang diisi tidak

¹¹Ibid hlm 232.

¹²Agus Dwianto, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, UGM Press, Yogyakarta, 2012, hlm 54.

¹³Ikhwan Ratna. 2012. "Reformasi Birokrasi Terhadap Penataan Pola Hubungan Jabatan Politik Dan Karir Dalam Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau". Jurnal Sosial Budaya (Vol. 9 No, hlm 14).

¹⁴Ibid.

sesuai seperti telah dijelaskan sebelumnya, kendala selanjutnya adalah hubungan antara pejabat politik dan pejabat karir.¹⁵

Kota Padang merupakan Ibu Kota di Provinsi Sumatera Barat yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dalam manajemen sumber daya manusia dengan melaksanakan lelang jabatan. Terpilihnya Walikota Padang yakni Mahyeldi Ansharullah periode 2014-2019. Dalam kepemimpinannya telah melaksanakan lelang jabatan tahun 2015, dan di tahun 2016 dilaksanakan kembali dalam pengisian kepala dinas yang sedang mengalami kekosongan. Pada tahun 2015 kota Padang sudah melaksanakan lelang jabatan yang diindikasikan peneliti memiliki permasalahan yaitu: Dalam pelaksanaan pergantian pejabat eselon II di lingkungan Pemko Padang tahun 2015, mutasi tidak sesuai aturan serta tidak transparan, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Faisal Nasir mengatakan pengangkatan pejabat di dinas badan dan kantor harus melalui seleksi atau lelang jabatan sebagaimana diatur Undang- Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Prosesnya dimulai dengan pembentukan panitia seleksi (Pansel) atau panitia lelang jabatan dari unsur Pemko dan independen.¹⁶

Mutasi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Pertambangan dan Energi Padang yang baru dijabat oleh Zabendri, tiba-tiba dikembalikan lagi ke posisi semula yakni Staf ahli hukum politik. Jumadi selaku Ketua Fraksi Golkar dan Bulan Bintang menyangkan mutasi di Pemko karena dinilai tanpa pertimbangan dan bisa berdampak pada kinerja pegawai di lingkungan Pemko.

¹⁵Ibid., hlm 7.

¹⁶ Padang Ekspres, *Mutasi Pejabat Dinilai Langgar Aturan*, 2015, www.m.padek.com , Diakses 28 Oktober 2016 pukul 10.39 WIB.

Jumadi juga melihat aneh dalam pergantian pejabat di Pemko karena ada yang dilantik tengah malam di rumah dinas.¹⁷

Kasus Adib Alfikri Mengikuti Lelang Jabatan Di Dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Padang juga menjadi sorotan. Adib yang awalnya bekerja di Dispora Provinsi Sumatera Barat, mengikuti lelang jabatan di dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sekaligus, Begitu juga dengan Rosail Akhyari Pardomuan yang juga mengikuti lelang jabatan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pertama di Kepala Satuan Pamong Praja, kedua calon Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.¹⁸

Adapun landasan hukum pelaksanaan lelang jabatan yang dilaksanakan tahun 2016, berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, lebih khusus diatur dalam Pasal 232 ayat (1) mengenai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁹ Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa, perangkat daerah adalah pembantu kepala daerah, dalam Peraturan Pemerintah ini juga disebutkan perangkat daerah Kabupaten atau Kota terdiri atas :²⁰

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
- 4. Dinas**
5. Badan
6. Kecamatan

¹⁷Ibid.

¹⁸Tabloid Bijak, *Adib Alfikri Ikuti Lelang Jabatan Di Dua SKPD Pemko Padang*, 2015, www.tabloidbijak.com, Diakses 28 Oktober 2016 pukul 10.39 WIB.

¹⁹ *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.

²⁰ *Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Darah*.

Dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lelang jabatan kepala dinas yang dikategorikan juga sebagai perangkat daerah. Selanjutnya lelang jabatan kepala dinas di Pemerintah Kota Padang juga telah dilaksanakan pada tahun 2016, akan tetapi masih terdapat kecacatan pada transparansi seperti yang disampaikan oleh Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang. Wahyu Iramana Putra Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menilai lelang jabatan tidak terbuka, berarti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pemko Padang hanya menjalankan lelang jabatan sebagai syarat belaka. Sedangkan orang yang akan duduk di jabatan tersebut sudah ada.²¹ Jika tim Pansel tidak terbuka dalam lelang jabatan ini, dicurigai ada sesuatu hal yang disembunyikan. Akan tetapi Walikota menilai selama ini lelang jabatan transparan.²² Selanjutnya ada penambahan syarat dalam lelang jabatan, seperti penambahan surat izin dari pimpinan daerah asal jika ingin mengikuti lelang jabatan di Padang, jika asal daerah Aparatur Sipil Negara (ASN) di luar Pemko Padang.²³ Serta pembentukan panitia yang tertutup dan tidak sesuai aturan seperti yang disampaikan oleh Budiman selaku Wakil Komisi 1 DPRD kota Padang.²⁴

..Saya memperoleh informasi bahwa Pansel yang dibentuk ini secara tertutup, dan orang ditentukan dalam Pansel ini seperti akademisi menurut saya tidak sesuai seperti ada yang gelar atau riwayat pendidikan dari Teknik, dan menurut saya ini adalah sebuah kesalahan yang fatal yang berefek pada penilaian Pansel nantinya.

²¹Harian Haluan, *Transparansi Lelang Jabatan Mulai Dibatasi*, 2016, www.harianhaluan.com. Diakses 14 Oktober 2016 Pukul 14.24 WIB.

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Wawancara Dilakukan Dengan Budiman selaku wakil Ketua Komisi 1 DPRD kota Padang Di Kantor DPRD Kota Padang, 10 Oktober 2016, Pukul 11.03 WIB.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Eka Putra Kabid Mutasi dan Promosi Jabatan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang:²⁵

..Lelang jabatan untuk dinas yang kosong telah dilaksanakan dan sudah terpilih kepala dinasnya, pada pelaksanaan lelang jabatan ini dilaksanakan secara transparans serta sudah sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kota Padang telah melaksanakan lelang jabatan sejak tahun 2015, dan selalu berjalan dengan baik serta sesuai aturan.

1.2 Rumusan Masalah

Birokrasi terdiri dari pejabat karir yang diangkat. Kewenangan dalam birokrasi di bagi beberapa jabatan sehingga tidak ada satupun orang yang mampu membuat semua keputusan. Birokrasi juga dominan dalam masyarakat modren karena mereka dapat mengkoordinasikan upaya-upaya dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan tugas secara efisien.²⁶ Reformasi birokrasi dengan memperhatikan pola perekrutan terhadap pejabat birokrasi yang diangkat oleh pejabat politik di lingkungan pemerintah masih belum berjalan sebagaimana mestinya.²⁷

Permasalahan dalam rekrutmen dan seleksi yang sering terjadi dalam birokrasi dan sekarang sudah ada aturan hukum yaitu: Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang di dalamnya juga mengatur tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Bab IX pasal 114-119.²⁸ Dalam hal ini pengisian jabatan kepala dinas Pemko Padang menggunakan model “*Job Tender*” atau lebih populer dengan istilah lelang jabatan. Dalam hal lelang jabatan, munculnya dan menjadi populer, ketika Joko Widodo yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, memulai untuk melakukan program

²⁵Wawancara Dilakukan Dengan Eka Putra selaku Kabid Mutasi Dan Promosi Jabatan Di Kantor BKD Kota Padang, 10 Oktober 2016, Pukul 10.23 WIB.

²⁶Ikwani Ratna, op.cit., hlm 17.

²⁷Ibid., hlm 16.

²⁸Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

tersebut untuk jabatan lurah dan camat di seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Sebelum Jokowi Bupati Jembrana, Gede Winasa dan Walikota Samarinda Syaharie Ja'ang telah mempelopori pemberlakuan promosi jabatan eselon II, III dan IV secara terbuka walau saat itu kurang populer.²⁹

Pada dasarnya, lelang jabatan atau promosi terbuka di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan suatu kebijakan yang saat ini harus dilakukan untuk mengisi kekosongan posisi atau jabatan kerja di dalam badan atau instansi pemerintah. Promosi terbuka juga dapat meningkatkan pengetahuan kompetensi kepada pegawai. Dengan adanya promosi terbuka, setiap orang berlomba-lomba ingin mendapatkan jabatan tertentu.³⁰ Hal ini tentunya perlu didukung oleh setiap orang yang memiliki syarat administratif berupa tingkat kepangkatan dan golongan, sehingga diperbolehkan mendaftarkan diri untuk mengisi lowongan yang tersedia sesuai dengan kemampuan seseorang dalam bidang yang dipilihnya, lelang jabatan merupakan salah satu pembaharuan mekanisme rekrutmen aparatur birokrasi yang transparan, bisa dipertanggung jawabkan, partisipatif, dan adil untuk mencari *the right person in the right position*.³¹

Adapun tahapan atau proses lelang jabatan dilakukan dengan tahapan: Pertama: pengumuman secara terbuka kepada instansi lain dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, atau media cetak, media elektronik (termasuk media on-line/internet), setiap pegawai yang telah memenuhi syarat administratif berupa tingkat kepangkatan dan golongan, diperbolehkan mendaftarkan diri untuk mengisi lowongan yang tersedia. Kedua: mekanisme seleksi penilaian

²⁹Drs. Mahmud Syarif Nasution, M.AP, 2015, *Problematika Implementasi Lelang Jabatan Publik*, (Online), (<http://bdkmedan.kemenag.go.id/wpcontent/uploads/PROBLEMATIKAIMPLEMENTASI-LELANG-JABATAN-ASN.pdf>), diakses 26 September 2016 Pukul 10.03 WIB.

³⁰Ibid., hlm 3.

³¹Ibid.

kompetensi manajerial dan kompetensi bidang (substansi tugas), penilaian kompetensi manajerial dilakukan dengan menggunakan metodologi psikometri, wawancara kompetensi dan analisa kasus dan presentasi, sedangkan penilaian kompetensi bidang dilakukan dengan metode tertulis dan wawancara (Standar kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh *assessor*. Ketiga: panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka melalui papan pengumuman, dan media cetak, media elektronik (termasuk media online/internet).³²

Panitia Seleksi selanjutnya mengusulkan tiga nama calon kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ditetapkan.³³ Sesuai penjelasan di atas maka pemerintahan kota Padang juga melaksanakan lelang jabatan untuk mendapatkan pejabat yang handal dan profesional. Di kota Padang sendiri telah melaksanakan lelang jabatan setingkat Kepala Dinas dan jumlah kepala dinas yang dilelang berjumlah tiga dinas yaitu:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang.
2. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.
3. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Dari data di atas terlihat bahwa dari tiga dinas yang sedang mengalami kekosongan sehingga dilaksanakan lelang jabatan untuk mengisi jabatan kepala dinas, dan sudah terpilih tiga nama calon kepala dinas dari tiga dinas yang sedang dilelang, setelah terpilihnya dari tiga calon dari masing- masing dinas yang sedang dilelang, maka pada tahapan akhir tiga nama akan dipilih oleh Walikota Padang

³²Ibid. hal 5.

³³Ibid., hlm. 6.

untuk menjadi kepala dinas dari tiga dinas yang sedang mengalami kekosongan. Selanjutnya peneliti juga memiliki data awal dalam peneletian ini yaitu profil dari tiga nama terbaik calon kepala dinas yang mengikuti lelang jabatan di tiga dinas yang mengalami kekosongan, dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Profil Calon Kepala Dinas Kota Padang tahun 2016.

No	Nama Calon	Identitas Pribadi	Pendidikan Terakhir	Jabatan Sekarang
1	Dr. Hj. Dasmiwarita, M.Kes.	- Tempat/Tanggal lahir : Bukittinggi/15 September 1960 - Usia : 56 Tahun - Alamat : Komp. Filano Blok B2 No.1 Rt/Rw 002/015 Kel. Parupuk Tabing, Kec. Koto Tengah.	S2 Kesehatan Masyarakat	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar
2	dr. Ferimulyani Hamid, Biomed.	- Tempat/Tanggal lahir : Padang/19 Februari 1967 - Usia : 48 Tahun - Alamat : Jl.ST Syahrir No.332 Padang Selatan	S2 Biomedik	Kepala Bidang Pengadilan Masalah Kesehatan.
3	Nazaruddin, SKM, M.Kes.	- Tempat/Tanggal lahir : Padang/19 Februari 1967 - Usia : 48 Tahun - Alamat : Jl.ST Syahrir No.332 Padang Selatan	S2 Kesehatan Masyarakat	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Padang
4	Al Amin,S.Sos, M.M.	- Tempat/Tanggal lahir : Padang/29 Juni 1969 - Usia : 47 Tahun - Alamat : Komp. Kehutanan Kampung Kalawi Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji.	S2 Manajemen.	Kepala Bagian Kesra Setda Kota Padang.
5	Drs. Arfian	- Tempat/Tanggal lahir : Padang/07 Juni 1965 - Usia : 51 Tahun - Alamat : Komp. Perumahan Citra Almara E-1	Strata S1	Camat Padang Barat
6	Ir. Oktavia Delri,	- Tempat/Tanggal lahir :	Strata S1	Kepala Bidang Tanaman

M.si	Koto Berapak/10 Oktober 1965 -Usia : 51 Tahun -Alamat : Komp. Kodam C/4 Siteba RT.001/RW.022 Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Padang.		Pangan dan Hortikultura
7 Amasrul, S.H	-Tempat/Tanggal lahir : Padang/05 Mei 1965 -Usia : 51 Tahun Alamat Jl. Raya Kurao RT 002 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Padang.	Strata S1	Kepala Bagian Pertanahan Setda Kota Padang
8 Drs. Erwin M, Ma	-Tempat/Tanggal lahir : Lubuk Alung/27 Juli 1968 -Usia : 48 Tahun Alamat Jl. Pasar baru Mudik No. 23 RT.1 Kel.Pasa Gadang.	Strata S2	Sekretariat BPMPTSP Kota Padang
9 Raju Minipora, SSTP, M.si	-Tempat/Tanggal lahir : Padang/24 Juni 1976 -Usia : 43 Tahun Alamat Komp. Puti Ganda Permai E/03 RT 02 RW 13 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah Padang.	Strata S2	Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan.

Sumber : Profil Calon KADIS, diolah dari BKD Kota Padang Tahun 2016.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka timbul asumsi awal bahwa dalam proses lelang jabatan ada kepentingan politik dari kepala daerah dalam menentukan kepala dinas. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan lelang jabatan kepala dinas di lingkungan pemerintah kota Padang tahun 2016?
2. Bagaimana kepentingan politik kepala daerah terjadi dalam lelang jabatan kepala dinas di lingkungan pemerintah kota Padang tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah dijelaskan dalam latar belakang dan perumusan masalah, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan lelang jabatan kepala dinas di lingkungan pemerintah kota Padang tahun 2016.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kepentingan politik kepala daerah terjadi dalam lelang jabatan kepala dinas di lingkungan pemerintah kota Padang tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini peneliti berharap mampu memberikan manfaat, yaitu:

a. Secara Akademis

Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan konsep lelang jabatan serta bagaimana kepentingan politik kepala daerah terjadi dalam lelang jabatan kepala dinas di lingkungan pemerintah kota Padang tahun 2016.

b. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dilakukan diharapkan dapat menjadi wawasan baru yang baik bagi mahasiswa tentang lelang jabatan dan bagaimana kepentingan politik kepala daerah terjadi dalam lelang jabatan kepala dinas di lingkungan pemerintah kota Padang tahun 2016.

